

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**M. Yusup Saputra<sup>1</sup>, Anton Arisman<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang  
<sup>1</sup>yusufnetral94@gmail.com, <sup>2</sup>ariman@stie-mdp.ac.id**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem informasi akuntansi keuangan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada pada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian, prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan lembaga pemerintahan ini dinilai telah memiliki sistem informasi akuntansi yang cukup memadai untuk menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan.*

**Kata kunci :** *Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan, Komisi Pemilihan Umum.*

**Abstract**

*This research aims to analyze the financial accounting information system to improving the quality of local government financial reports on General Elections Commission of South Sumatra Province. This study uses a qualitative method by using two types of data are primary and secondary data. In doing research, collection data process in this study using collection data techniques of interviews and documentation. Based on analysis that has been done, these government agencies considered to have had a accounting information system reasonably sufficient to support the improvement of the quality of financial statements.*

**Keyword :** *Finance, accounting information system, the quality financial reports general elections commission of south Sumatra province.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan sistem informasi yang di iringi reformasi sektor publik yang begitu dinamis saat ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang dapat melihat secara kritis baik dan buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Sistem informasi berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan, hal ini ditujukan untuk memperlancar operasional kerja. Berkembangnya teknologi informasi memiliki peranan sangat penting dalam menjadwalkan aktivitas manusia, baik dalam dunia sosial maupun dunia pekerjaan (Handayani, 2012).

Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi, sistem informasi akuntansi konvensional telah berkembang menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis komputer memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dan menyajikannya lebih cepat dan akurat mengenai informasi keuangan. Informasi keuangan sangat penting bagi perusahaan/lembaga untuk melakukan riset mengenai informasi yang disajikan, dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode yang sebelumnya. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu (Kasmir, 2013).

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, demokratis, amanah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum (Renyowijoyo, 2008).

Laporan Keuangan yang pelaporannya dibuat selama satu periode bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas (dalam hal ini pemerintah). Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini keppres yang berlaku adalah keppres nomor 42 tahun 2002.

Berdasarkan hal ini laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat penting dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan yang relevan dan akan lebih bermanfaat apabila penyusunan tepat pada waktunya. Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan, sehingga jelas batas pelaporan dari posisi harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dari instansi, perusahaan atau suatu lembaga yang akan dilaporkan. Penyajian laporan keuangan harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar, dalam arti tidak terlalu terlambat sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang sifatnya manajerial maupun teknikal. Dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis komputer, waktu pembuatan dan penyajian laporan keuangan khususnya terkait dengan anggaran akan lebih cepat dan tepat pada waktunya jika didukung oleh aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).

Aplikasi SILABI dibuat untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan memberikan kemudahan pembuatan laporan standar akuntansi pemerintah di unit kuasa pengguna anggaran. Penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor (dalam hal ini BPK) terhadap laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu perlunya menerapkan SAP dengan benar dan tepat. Hal ini sangat penting karena SAP

merupakan standar akuntansi yang harus dipakai dan diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi bantuan Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) dalam mempermudah pembuatan laporan keuangan, masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan/lembaga pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan contoh salah satu Lembaga dengan jumlah anggaran yang besar dari anggaran dana APBN hal ini terkait dengan adanya anggaran untuk kepentingan pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen pemilu, mengelola barang inventaris pemilu dan bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam membantu penyusunan dan pembuatan laporan keuangan diperlukan sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi seperti aplikasi SILABI.

Sekretariat Jenderal KPU Provinsi Sumatera Selatan Selatan merupakan pelaksana Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang ikut serta dalam penerapan system informasi akuntansi berupa aplikasi SILABI untuk bagian keuangannya. Sekretariat Jenderal KPU sebagai instansi pemerintahan menyusun LAKIP sebagaimana diamanatkan dalam instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan penganggaran komisi pemilihan umum melibatkan seluruh KPU di seluruh Indonesia, mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, indikator, kinerja dan target kinerja. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satuan kegiatan yang dianggarkan. Menurut pengamatan lapangan, pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pada Sekretariat Jenderal KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelaksana Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang ikut serta dalam penerapan system informasi akuntansi berupa aplikasi SILABI untuk bagian keuangannya di rasakan masih belum optimal. Adanya penggabungan sub bagian penerimaan dan pengeluaran pada bagian keuangan di Sekretariat Jenderal KPU Provinsi Sumatera Selatan serta kelemahan pada aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) berupa transaksi dengan pihak ketiga tidak dapat tercatat dalam aplikasi menyebabkan tidak akuratnya pertanggungjawaban laporan keuangan.

Pada Sekretariat Jenderal KPU Provinsi Sumatera Selatan system informasi yang digunakan sejak tahun 2015 meliputi 3 (tiga) aplikasi yakni aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar) yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk meng-input SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang kemudian SP2D diproses pada aplikasi SILABI, dan laporan akhirnya diproses dengan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua). Dengan adanya kelemahan pada aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) berupa transaksi dengan pihak ketiga tidak dapat tercatat dalam aplikasi misalnya seperti transaksi pembelian inventaris kantor berupa komputer, dimana KPU yang menerima dana dari APBN melakukan pembelian komputer dengan pihak eksternal di luar pemerintahan. Pembelian dengan pihak eksternal ini tidak dapat tercatat di dalam aplikasi SILABI yang menyebabkan tidak akuratnya pertanggungjawaban laporan keuangan mengakibatkan kurang memuaskannya opini hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun 2012-2016.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Opini Wajar Dengan Pengecualian selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan indikasi bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak pusat tersebut khususnya lembaga komisi pemilihan umum masih belum memenuhi syarat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya laporan keuangan yang memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) dan TMP (tidak memberikan pendapat) berdasarkan hasil analisis dan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan beberapa kasus kelemahan terkait sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah .

Berdasarkan fenomena di Sekretaria Jenderal KPU Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipaparkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Sekretaria Jenderal KPU Provinsi Sumatera Selatan masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria

nilai informasi yang disyaratkan dan ditentukan. Berkaitan dengan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel fundamental dan teknikal terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 baik secara parsial maupun simultan.

## **2. Landasan Teori**

Menurut Krismiaji (2015, h. 4), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat memproses data dan transaksi guna untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan.

Menurut Krismiaji (2015, h. 7) tujuan sistem informasi akuntansi meliputi : Untuk bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi, untuk keterampilan dalam bidang sistem informasi akuntansi penting mendukung keberhasilan karir, dan untuk komponen kunci dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut Tanjung (2009, h.35) Akuntansi Pemerintah merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran dengan cara yang telah ditentukan dalam ukuran moneter (dalam hal ini uang), dan transaksi atau kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan keuangan merupakan serangkaian daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis dan terpadu oleh seorang akuntan pada akhir periode atau catatan yang dapat memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Pengertian Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007,h.7) Laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam beragam cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang mana merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

## **3. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan mendapatkan data mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas serta prosedur pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

Objek penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan komponen laporan keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Subjek penelitian ini adalah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Jenis data yang digunakan ialah data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai: Sejarah singkat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan pembagian tugas, visi dan misi Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur pencatatan laporan keuangan yang ditujukan langsung kepada staff/karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan data sekunder yang dipakai dan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan laporan keuangan serta informasi mengenai perkembangan opini LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) BPK dari website resmi bpk.go.id

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik. Namun hal ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik agar mampu mengoperasikan dan memahami sistem akuntansi keuangan yang digunakan. Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggungjawaban saja, namun laporan keuangan juga dijadikan ukuran kinerja suatu instansi tersebut. Laporan keuangan juga dijadikan sebagai dasar bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, untuk itu pentingnya kualitas laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sudah memenuhi kriteria relevan, handal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan.

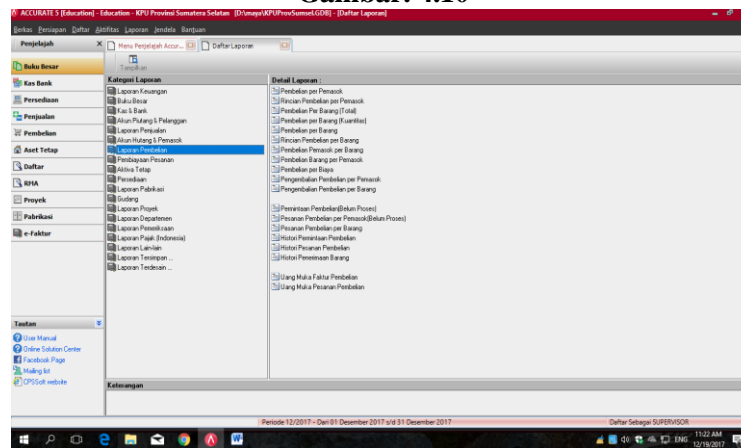
Aplikasi *Accurate* digunakan untuk mengoptimalkan sistem informasi akuntansi yang ada pada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Rancangan ini berisi tampilan *form* pencatatan pengeluaran kas yang berupa pencatatan pembelian dengan pihak ketiga yang terdiri dari Penjualan, Pembelian, Persediaan, Kas Bank, Buku Besar sampai dengan Laporan Keuangan. *Accurate* memiliki lebih dari 250 macam laporan. Semua laporan tersebut dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan seperti menampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh *Accurate* ini sendiri terjamin kualitasnya karena laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAK dan perpajakan Indonesia.

KPU Provinsi Sumatera Selatan ini sebelumnya melakukan pencatatan pengeluaran kas dengan menggunakan bantuan aplikasi computer berupa Ms.excel (penyimpanan pendukung) dan pencatatan manual dengan buku (penyimpanan data utama). Pencatatannya dilakukan sesuai dengan tanggal kronologis penerimaan terjadi. Berikut ini adalah tampilan layar (*form*) yang di usulkan untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan *Aplikasi Accurate 2017* untuk memudahkan dalam mengakses data.

**Gambar 4.9**

**Tampilan Form Pengeluaran Kas**

Gambar. 4.10



Tampilan Form Laporan Keuangan Khusus Pengeluaran Kas (Pembelian)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem informasi akuntansi keuangan yang terjadi di KPU Provinsi Sumatera Selatan yaitu terjadi ketidakefektifan penggunaan aplikasi SILABI yang tidak bisa mencatat transaksi dengan pihak ketiga sehingga transaksi tersebut harus dicatat menggunakan aplikasi Ms Excel. Hal ini menyebabkan saat pembuatan laporan keuangan data yang digunakan kurang akurat sebab data yang disajikan hanya berdasarkan data yang dicatat di aplikasi Ms Excel. Dimana dalam pelaporan keuangan KPU yang merupakan bagian dari lembaga pemerintahan harus melaporkan data penunjang keuangan yang berstandar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya pencatatan transaksi dengan menggunakan aplikasi *accurate* diharapkan dapat melengkapi dokumen akuntansi dari bagian pengeluaran kas, sehingga pada saat pelaporan keuangan data pengeluaran kas dapat dipertanggung jawabkan secara benar dan akurat.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu; *Petama* bagi KPU Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi subjek dalam penelitian ini perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. *Kedua*, pentingnya kualifikasi sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya sistem akuntansi keuangan yang telah diterapkan pada KPU Provinsi Sumatera Selatan. *Ketiga*, bagi peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak terfokus hanya pada satu indikator permasalahan saja seperti dalam penelitian ini yang hanya terfokus pada permasalahan tidak dapat tercatatnya transaksi dengan pihak ketiga dalam aplikasi SILABI, namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa indikator permasalahan lainnya yang menyebabkan opini laporan keuangan KPU selalu mendapatkan opini WDP sehingga menggambarkan secara rinci permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan yang digunakan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Hafiz Tanjung 2009, *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- ACIS Indonesia 2015, *Sejarah Accurate*, Diakses 15 September 2016, dari <http://acisindonesia.com/sejarah-accurate-accounting-software/>
- BPK RI 2017, *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Diakses 28 Agustus 2016, dari [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Halim, Abdul 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hall, James A 2008, *Sistem Informasi Akuntansi Buku I Edisi IV*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Krismiaji 2015, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*, UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Linna Yuliana 2016, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Pengalaman Kerja dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah*, Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah surakarta, Diakses 28 Agustus 2016, dari [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id)